



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-23/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

DAFTAR FORMULIR

NO	NAMA FORMULIR
1.	Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan
2.	Surat Keputusan Pembentukan Tim Penelaah
3.	Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
4.	Berita Acara Penelaahan Usul Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
5.	Berita Acara Penelaahan Usul Penyidikan Tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan
6.	Surat Permintaan Penerbitan SPPBP
7.	Surat kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan mengenai Permintaan Bantuan Tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan
8.	Surat Penunjukan Tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan ke Kantor Wilayah DJP)
9.	Surat Penunjukan Tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan (Dari Kantor Wilayah DJP ke KPP)
10.	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka
11.	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup
12.	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan (Terbuka)
13.	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan (Tertutup)
14.	Berita Acara Pembatalan SPPBP/SPPBP Perubahan
15.	Berita Acara Serah Terima Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan
16.	Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan
17.	Pakta Integritas
18.	Nota Dinas kepada Kepala UPPBP Mengenai Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
19.	Surat Ke Unit Lain di DJP Mengenai Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
20.	Surat Perintah Penugasan
21.	Nota Dinas Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Pemeriksa Bukti Permulaan kepada Kepala Bidang)
22.	Nota Dinas Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Kepala Bidang kepada Kepala Kantor Wilayah DJP)
23.	Surat Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan)
24.	Nota Dinas Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Pemeriksa Bukti Permulaan kepada Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan)
25.	Nota Dinas Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan)
26.	Nota Dinas Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Direktur Intelijen dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Pajak)
27.	Nota Dinas Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan RI)
28.	Surat Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan (Dari Menteri Keuangan RI kepada Dewan Komisiner OJK)
29.	Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka
30.	Surat kepada Terperiksa mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka
31.	Surat Peminjaman Berkas ke Unit Lain di DJP
32.	Tanda Terima Peminjaman/Pengembalian Berkas/Dokumen/Data/Barang Lainnya dari Unit Lain di DJP, Orang Pribadi/Badan yang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Pihak Lain
33.	Berita Acara Penyampaian Penangguhan Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
34.	Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan
35.	Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan
36.	Laporan Pelaksanaan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
37.	Undangan kepada Wajib Pajak Dalam Rangka Peminjaman/Pengembalian Berkas Pemeriksaan
38.	Undangan kepada Pemeriksa Dalam Rangka Peminjaman/Pengembalian Berkas Pemeriksaan
39.	Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti dari Pemeriksa
40.	Berita Acara Pengembalian Berkas ke Pemeriksa
41.	Kuesioner Gambaran Umum Sistem Informasi
42.	Berita Acara Perolehan Data Elektronik
43.	Lampiran Rincian Perolehan Data Elektronik (<i>Image File</i>)
44.	Lampiran Rincian Perolehan Data Elektronik (<i>DD Image</i>)

NO	NAMA FORMULIR
45.	Lampiran Rincian Perolehan Data Elektronik (<i>Harddisk Cloning</i>)
46.	Lampiran Rincian Perolehan Data Elektronik (<i>Copy File</i>)
47.	Lampiran Rincian Perolehan Data Elektronik (<i>Cellular Phone Image File</i>)
48.	Formulir Segel
49.	Berita Acara Penyegehan
50.	Berita Acara Pembukaan Segel
51.	Berita Acara Kerusakan/Kehilangan Tanda Segel
52.	Surat kepada Terperiksa mengenai Peminjaman Bahan Bukti
53.	Daftar Bahan Bukti yang Dipinjam
54.	Surat Peringatan kepada Terperiksa Untuk Meminjamkan Bahan Bukti
55.	Daftar Bahan Bukti yang Belum Dipinjamkan
56.	Berita Acara Tidak Terpenuhinya Peminjaman Bahan Bukti
57.	Surat Panggilan Dalam Rangka Permintaan Keterangan (Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka)
58.	Surat Pemberitahuan kepada Atasan Pihak Lain
59.	Surat Panggilan Dalam Rangka Permintaan Keterangan (Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup)
60.	Berita Acara Permintaan Keterangan
61.	Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan
62.	Surat kepada Pihak Ketiga mengenai Permintaan Secara Tertulis Keterangan dan/atau Bukti (Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka)
63.	Daftar Keterangan/Bukti yang Diminta
64.	Surat kepada Pihak Ketiga mengenai Permintaan Secara Tertulis Keterangan dan/atau Bukti (Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup)
65.	Daftar Keterangan/Bukti yang Diminta
66.	Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan dan/atau Bukti kepada Pihak Ketiga
67.	Tanda Serah/Terima Data dan/atau Perangkat Elektronik
68.	Nota Dinas Pengawasan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
69.	Nota Dinas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
70.	Nota Dinas Jawaban Atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
71.	Nota Dinas kepada Kepala UPPBP mengenai Laporan Tindak Pidana Selain Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
72.	Surat Pemberitahuan mengenai Tindak Pidana Selain Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
73.	Surat ke KPP mengenai Pengiriman Temuan Potensi Pajak
74.	Nota Dinas Kepada Kepala UPPBP mengenai Laporan Keterlibatan Pegawai DJP
75.	Laporan Kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai Keterlibatan Pegawai DJP (Dari Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Direktur Jenderal Pajak)
76.	Nota Dinas Kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai Laporan Keterlibatan Pegawai DJP (Dari Direktur Intelijen dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Pajak)
77.	Laporan Perkembangan
78.	Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan
79.	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
80.	Laporan Kejadian
81.	<i>Checklist</i> Penelitian KPP atas Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
82.	Surat Permintaan Kelengkapan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
83.	Permohonan Pemindahbukuan
84.	Berita Acara Wajib Pajak Tidak Menggunakan Kesempatan Untuk Melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
85.	Surat Pemberitahuan kepada WP bahwa Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya
86.	Pemberitahuan kepada WP bahwa Surat/Pembayaran Wajib Pajak tidak Diakui Sebagai Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
87.	Surat kepada WP mengenai Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan Karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya
88.	Surat ke KPP mengenai Pengiriman Nota Penghitungan
89.	Surat kepada Terperiksa mengenai Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan
90.	Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai Dengan Keadaan yang Sebenarnya

NO	NAMA FORMULIR
91.	Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan terhadap WP Karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya
92.	Undangan ke KPP Dalam Rangka Pengawasan Pasca Pemeriksaan Bukti Permulaan
93.	Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan
94.	Undangan Kepada Terperiksa Dalam Rangka Pengembalian dan/atau Penyitaan Bahan Bukti
95.	Daftar Bahan Bukti yang akan Dikembalikan/Disita
96.	Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pengembalian/Penyitaan Bahan Bukti
97.	Berita Acara Menolak Menandatangani Bukti Pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya
98.	Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup Dilanjutkan ke Penyidikan